



PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN PERIODE 2017-2022

Hardiansyah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Ardiansyahjambi52@gmail.com

Usdeldi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: usdeldi@uinjambi.ac.id

Ferri Saputra Tanjung

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

Corresponding author : Ardiansyahjambi52@gmail.com

Abstract. *Economic growth in the Jambi Province region experienced a delay where in 2020 Jambi Province's economic growth slowed compared to 2019. Jambi Province's economy in 2020 was reflected in GRDP which grew by 4.40%, decreased compared to 2019 of 4.71%, and lower than growth national economy which grew by 5.02%. The eleven regions in Jambi Province have the potential to develop their economic activities because they have an ever-increasing economic growth. This is an added value which is a positive side of the equitable development carried out in Indonesia. This study aims to analyze the effect of general allocation funds, special allocation funds and local original income on the weakness of economic growth in districts and cities in Jambi Province in the 2017-2022 period. The research method used in this research is associative causal with a quantitative approach. The study population was 11 districts and cities in Jambi Province. The sampling technique uses purposive sampling, namely the sample selected by taking the research object which is selective and has specific characteristics of the population so that it can be considered quite representative. The samples used in this study were 11 regencies and cities in Jambi Province for the 2017-2022 period. The results of partial hypothesis testing show that the DAU variable (X_1) has an effect on economic growth (Y), this is evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($2,745 > 1,99834$) DAK variable (X_2) has an effect on economic growth (Y) this is evidenced with $t_{count} < t_{table}$ ($3,740 > 1,99834$) and local revenue (X_3) have an effect on economic growth (Y), this is evidenced by the value of $t_{count} > t_{table}$ ($4,027 > 1,99834$). The results of simultaneous hypothesis testing show that the variables DAU (X_1), DAK (X_2) and PAD (X_3) have an influence on economic growth (Y), this is evidenced by the value of $F_{count} > F_{table}$ ($8,010 > 2,75$). The results of this study can be concluded that the variable X_1 partially affects the Y variable while the X_2 variable has no effect on the Y variable, the X_3 variable influences the Y variable and simultaneously shows that the variables X_1 , X_2 and X_3 have the effect of the Y variable.*

Keywords: *Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Income*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi mengalami keterlambatan dimana pada 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat dibandingkan 2019. Ekonomi Provinsi Jambi pada 2020 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar 4,40%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,71%, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,02%. Kesebelas wilayah yang ada di Provinsi Jambi tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini merupakan nilai tambah yang menjadi sisi positif dari pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di provinsi Jambi periode 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik dari

populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi dengan periode 2017-2022. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel DAU (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), hal ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,745 > 1,99834$) variabel DAK (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,740 > 1,99834$) dan pendapatan asli daerah (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,027 > 1,99834$). Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel DAU (X_1), DAK (X_2) dan PAD (X_3) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,010 > 2,75$). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X_1 berpengaruh terhadap variabel Y , variabel X_2 berpengaruh terhadap variabel Y , variabel X_3 berpengaruh terhadap variabel Y dan secara simultan menunjukkan bahwa variabel X_1 , X_2 dan X_3 memiliki pengaruh variabel Y .

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

LATAR BELAKANG

Pemerintahan merupakan suatu wujud nyata dari adanya peradaban di suatu wilayah. Eksistensi pemerintahan dibutuhkan oleh konstituen guna memperoleh legitimasi wilayah yang ditempatinya. Sehingga keberadaan suatu pemerintahan sangat diperlukan bagi manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Di Indonesia aktivitas pemerintahan secara garis besar dibagi menjadi empat golongan, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinaungi oleh suatu pemerintahan salah satunya harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena segala sesuatu yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki *value* atau terukur secara objektif dan terperinci. Sehingga akuntabilitas memiliki urgensi yang vital dalam setiap pelaksanaan aktivitas pemerintahan, dalam konteks ini akuntabilitas pemerintahan dapat dikaitkan dengan bidang kajian ilmu ekonomi yakni akuntansi sektor publik.

Konsepsi akuntansi sektor publik dalam menelaah proses dan kegiatan pada bidang pemerintahan lebih cocok digunakan ketimbang akuntansi sektor privat. Dalam konsep keilmuan akuntansi sektor publik sendiri memiliki beberapa telaah fokus seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, kenaikan anggaran, belanja modal, kelemahan pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Penulis memilih empat fokus kajian, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Setiyawati dan Hamzah (2015), secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Berikut ini data mengenai data PDRB :

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	17 728,32	18 661,33	19 655,79	18 918,89	19 515,00	20 529,73
2.	Kota Sungai Penuh	4 183,87	4 388,18	4 607,81	4 600,23	4 768,84	4 980,84
3.	Kab. Batang Hari	10 634,36	11 147,66	11 713,38	11 662,61	12 227,99	13 728,62
4.	Kab. Bungo	11 510,00	12 045,80	12 557,97	12 507,63	13 144,00	13 734,00
5.	Kab. Kerinci	5 784,49	6 069,60	6 326, 54	6 559, 98	6 822, 79	7 125, 04
6.	Kab. Merangin	8 621, 91	9 052,64	9 443,00	9 532,17	10 046, 46	10 640, 54
7.	Kab. Muaro Jambi	14 655,06	15 389, 57	16 126,72	16 186, 86	16 847, 01	18 182, 03
8.	Kab. Sarolangun	9 808, 60	10 279, 95	10 757, 77	10 729, 47	11 396, 00	12 163, 00
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	27 421, 79	29 279, 46	30 744, 99	30 559,42	30 976, 20	31 866, 59
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	16 748, 26	17 241, 20	17 967, 59	17 349, 98	17 373, 49	17 471, 91
11.	Kab. Tebo	9 239, 00	9 700,00	10 161, 00	10 159, 00	10 597, 00	11 262, 58

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi.

Merujuk pada data dalam tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa produk domestik regional bruto yang merupakan representasi dari pertumbuhan ekonomi di setiap daerah senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, kesebelas wilayah yang ada di Provinsi Jambi tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini merupakan nilai tambah yang menjadi sisi positif dari pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Berikut ini data mengenai dana alokasi umum di Provinsi Jambi dalam tabel :

Tabel 1.2 Dana Alokasi Umum di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi

(Milyar Rupiah)

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	714, 78	714,78	759, 71	690, 72	675, 29	675, 29
2.	Kota Sungai Penuh	419, 52	433, 53	452,46	414,33	405, 07	405, 07
3.	Kab. Batang Hari	605, 74	605, 74	632, 05	571, 90	559, 82	560, 13
4.	Kab. Bungo	636, 00	636, 00	657, 96	602, 61	589, 40	589, 40
5.	Kab. Kerinci	589, 20	589, 20	613, 63	570, 39	557, 77	557, 77
6.	Kab. Merangin	718, 85	718, 85	742, 33	669, 44	658, 73	658, 89
7.	Kab. Muaro Jambi	670, 34	670, 34	700, 82	631, 35	619, 50	620, 13
8.	Kab. Sarolangun	583, 15	583, 15	600, 49	539, 03	529,16	529, 50
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	506, 59	506, 59	537, 18	490, 34	479, 38	479, 79
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	533, 20	540, 40	565, 64	523, 90	514, 77	514, 99
11.	Kab. Tebo	582, 31	582, 31	599, 22	536, 52	528, 39	528, 68

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Merujuk pada tabulasi data di atas, maka dapat diketahui bahwa dana alokasi umum yang diterima oleh masing masing daerah di Provinsi Jambi memiliki perbedaan. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang termasuk dana perimbangan Pemerintah Pusat yang disalurkan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Sehingga, nilai yang diterima masing-masing wilayah memiliki perbedaan yang elementer sesuai perhitungan atau kalkulasi kontribusi yang diberikan oleh daerah tersebut.

Dalam aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh institusi-institusi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dikenal pula istilah Dana Alokasi Khusus. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran nilai dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut ini data mengenai dana alokasi khusus:

Tabel 1.3 Dana Alokasi Khusus di 11 Wilayah Kab/Kota Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	95,54	154, 42	110, 91	129, 93	108, 25	57, 74
2.	Kota Sungai Penuh	54, 34	48,29	60, 66	50,90	43, 80	40, 02

3.	Kab. Batang Hari	63, 25	58, 51	77, 30	94, 94	118, 89	101, 43
4.	Kab. Bungo	119, 35	100, 24	111, 45	92, 12	54, 79	54, 37
5.	Kab. Kerinci	95, 65	54, 93	82, 14	50, 90	73, 30	42, 65
6.	Kab. Merangin	90, 57	85, 41	138, 34	113, 31	110, 37	52, 36
7.	Kab. Muaro Jambi	63, 41	74, 05	76, 95	55, 88	83, 07	76, 99
8.	Kab. Sarolangun	77, 91	70, 95	130, 65	86, 15	78, 57	84, 17
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	55, 16	56, 78	84, 37	91, 23	74, 78	70, 01
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	97, 55	121, 19	118, 89	85, 42	114, 07	117, 39
11.	Kab. Tebo	50, 84	45, 43	74, 75	57, 13	113, 29	124, 41

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan pada data dalam tabulasi dana alokasi khusus yang diperoleh masing-masing Pemerintah Daerah memiliki nilai yang bersifat fluktuatif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerimaan akan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai operasional pemerintahannya dengan baik. Sehingga, dana alokasi umum di masing-masing Pemerintah Daerah memiliki sifat yang fluktuatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Berbagai persoalan yang mengemuka dalam aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi tersebut merupakan suatu indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan suatu reformasi birokrasi yang menyeluruh sehingga tidak terjadi adanya potensi *fraud* di wilayah pemerintahannya. Kondisi ini juga akan memicu terjadinya suatu perbaikan sistem pengelolaan anggaran yang berbasis pada keterbukaan dan kalkulasi yang rasional. Sehingga, pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilakukan secara baik. Berikut ini data mengenai pendapatan asli daerah di provinsi Jambi.

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah di 11 Wilayah Kab/kota Provinsi Jambi
(Milyar Rupiah)**

No.	Daerah	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	320, 93	328, 90	364, 14	403, 48	419, 56	465, 89
2.	Kota Sungai Penuh	42, 63	42, 63	47, 07	48, 17	46, 24	99, 14
3.	Kab. Batang Hari	87, 19	112, 00	141, 50	164, 58	138, 01	138, 86
4.	Kab. Bungo	127, 87	137, 66	151, 30	153, 25	145, 14	165, 27
5.	Kab. Kerinci	74, 24	80, 24	104, 74	108, 16	85, 91	33, 78
6.	Kab. Merangin	87, 05	85, 43	86, 63	95, 22	108, 34	118, 22
7.	Kab. Muaro	58, 75	76, 90	80, 02	99, 63	102, 26	106, 49

	Jambi						
8.	Kab. Sarolangun	75, 47	99, 78	121, 16	95, 43	106, 39	93, 15
9.	Kab. Tanjung Jabung Barat	90, 35	85, 00	100, 28	104, 11	120, 00	96, 14
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur	41, 95	73, 17	47, 59	52, 17	53, 90	67, 93
11.	Kab. Tebo	74, 32	72, 82	74, 39	77, 13	77, 13	82, 97

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Dan Menurut Yani (2001: 110) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengaluran nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut halim (2014: 16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2014: 16) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipungut perundang-undangan (pasal 1 angka 18).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Afafun Nisa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gordianus Dedi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah Seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing variabel dependennya sesuai dengan analisis jalur masing-masing variabel, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh

terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan pada uraian permasalahan dan juga persoalan penelitian terdahulu yang sudah penulis deskripsikan pada latar belakang, Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2017-2021”.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Keagenan

Hubungan dua pihak dan agen merupakan teori dasar teori keagenan, dimana agen adalah pihak yang dipercaya dan diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan principal adalah orang yang memberi kekuasaan. Mengawasi dan mengevaluasi tugas yang dilakukan oleh agen. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan benturan kepentingan. Agen memiliki informasi lebih banyak dari pada principal. Yang dapat menimbulkan tindakan atau tindakan yang menguntungkan dirinya.

Tindakan yang bisa dilakukan atas keinginan dan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan usaha dan kepentingannya. Prinsipal dalam hal ini akan kesulitan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Didalam sektor publik, hubungan keagenan dalam hal ini antara legislatif dan eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif bertindak sebagai pihak prinsipal, sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau bertindak sebagai pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Penyerahan sepenuhnya penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan mencukupi kebutuhan daerahnya.

2. Teori Pelayanan

Stewardship Theory merupakan suatu teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer tidak termotivasi terhadap tujuan individu namun lebih termotivasi pada tujuan hasil utama organisasi demi kepentingan bersama, teori ini sebenarnya memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang sedemikian rupa dimana steward diperankan oleh para eksekutif yang termotivasi agar bertindak sesuai kemauan principal, akan tetapi karena perilaku steward bertujuan untuk mencapai tujuan organisasinya sehingga steward tidak akan meninggalkan organisasinya.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bergerak seiring dengan laju daya beli dan daya konsumsi suatu masyarakat di wilayah tertentu. Melalui pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah dapat dikategorikan tertinggal,

berkembang atau maju, melalui capaian pertumbuhan ekonominya. Menurut Setiyawati dan Hamzah, secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Secara praktis pendapat yang dikemukakan oleh Setiyawati dan Hamzah tersebut mengacu pada adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu merupakan suatu gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan produksi yang memiliki relevansi dengan seluruh aktivitas masyarakat ketika melakukan transaksi yang menyebabkan timbulnya perputaran ekonomi.

b. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ada yang dari dalam atau internal dan ada juga yang dari luar atau eksternal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas faktor-faktor ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif. Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

- 1) Sumber daya alam
- 2) Infrastruktur
- 3) Sumber daya manusia
- 4) Teknologi
- 5) kebijakan

c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melakukan suatu upaya ekstraksi atas variabel pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan suatu indikator yang dapat melaksanakan fungsi ekstraksi tersebut. Penggunaan indikator ini sejatinya merupakan suatu upaya yang dibutuhkan guna memudahkan perhitungan atas suatu variabel penelitian. Sehingga, variabel tersebut dapat dihitung menggunakan mekanisme perhitungan statistik yang memungkinkan tingkat akurasi dapat terwujud dalam penelitian yang tengah dilakukan.

Setelah mampu memahami makna pertumbuhan ekonomi secara holistik dan komprehensif berdasarkan pendapat dari para ahli, maka sebagaimana kelemahan pengendalian internal dan pendapatan asli daerah, variabel pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan suatu indikator yang dapat difungsikan sebagai parameter pengukuran dalam pengolahan data statistik. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi merupakan rasio antara produk domestik regional bruto di suatu Pemerintah Daerah dengan nilai PDRB tahun sebelumnya yang dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut :

$$R(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t-1} \times 100\% - 100\%$$

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009

4. Dana Alokasi Umum

a. Definisi Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah komponen keuangan yang memiliki posisi vital dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah. Dana alokasi umum ini bersumber dari APBN yang ditransfer ke masing-masing Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Melalui transfer dana alokasi umum, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperpendek *gap* yang ada diantara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia demi terciptanya otonomi daerah.

b. Besaran Dana Alokasi Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pagu alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Neto. Sampai dengan tahun 2014 pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar 26% dari PDN Neto, kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 pagu alokasi DAU ditetapkan naik menjadi sebesar 27,7% dari PDN Neto, terakhir tahun 2017 dan tahun 2018 pagu alokasi DAU ditetapkan naik menjadi sebesar 28,7% dari PDN Neto.

c. Indikator Dana Alokasi Umum

Indikator variabel dana alokasi umum memiliki fungsi vital yang dapat digunakan sebagai parameter bagi pengukuran variabel untuk dapat diekstraksi melalui perhitungan statistik. Indikator ini selanjutnya juga dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan akurasi perhitungan yang dibutuhkan oleh Peneliti dalam menganalisis hasil olah data. Sehingga, hasil pengolahan data statistik tersebut dapat memiliki sifat yang empiris dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Setelah memahami makna dana alokasi umum berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka langkah selanjutnya adalah menentukan indikator yang digunakan dalam memilih nilai pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah proses penelitian terutama terkait dengan proses perhitungan data statistik yang akan dilakukan dalam pemaparan hasil penelitian. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana alokasi umum merupakan rasio antara alokasi dasar keuangan di suatu Pemerintah Daerah dengan nilai celah fiskal yang dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013

5. Dana Alokasi Khusus

a. Definisi Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus sebagaimana dana alokasi umum juga merupakan salah satu transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mendanai sejumlah kebutuhan khusus Pemerintah Daerah yang sesuai

dengan rencana strategis Nasional. Dana alokasi khusus biasanya memiliki kecenderungan lebih tinggi diberikan untuk daerah-daerah dengan kemampuan finansial yang kurang baik ketimbang daerah-daerah dengan kemampuan finansial yang telah baik.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran nilai dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Artinya, melalui dana alokasi khusus Pemerintah Pusat “menitipkan” sejumlah pembangunan yang menjadi prioritas skala Nasional kepada masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga, beban pembangunan Negara tidak hanya terpusat dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia saja melainkan juga terdapat andil atau pelibatan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan pembangunan Nasional.

b. Dinamika Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dinamika penyaluran dana alokasi khusus sangat urgen guna memberikan gambaran tentang bagaimana suatu pengelolaan dana dapat diserap dan/atau disalurkan oleh suatu pemerintahan. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan bagi kegiatan operasional khusus di wilayah pemerintahannya. Sehingga, dinamika penyalurannya perlu mendapat porsi yang cukup untuk disajikan sebagai suatu kajian akademik yang relevan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di tempat penelitian.

Dana alokasi khusus sebagai bagian dari transfer perimbangan keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam struktur keuangan daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dana alokasi khusus kerap memperoleh hambatan dimana serapan alokasi dana tersebut sulit untuk diimplementasikan. Hal ini mengacu pada regulasi yang mengatur tentang dana alokasi khusus yang berkaitan hanya pada kebutuhan khusus seperti terjadinya bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana terjadi pada saat ini yakni pandemi suatu penyakit.

Dana alokasi khusus biasanya diberikan selama periode keuangan yang berlaku pada periode yang tengah dijalankan oleh suatu Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, dana alokasi khusus dengan segala dinamikanya tetap melakukan prediksi terhadap target dan realisasi dana alokasi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, potensi adanya penggunaan dana alokasi khusus yang tidak tepat dapat diminimalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Indikator Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dana alokasi menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 12 ayat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

DAK = Realisasi Penerimaan Umum Daerah – Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2007 menetapkan rumus dana alokasi khusus dengan persamaan sebagai berikut :

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu komponen pemasukan kas keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan dari potensi daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, hal tersebut terjadi karena apabila pendapat asli daerah semakin tinggi, maka Pemerintah Daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang mampu secara finansial, sedangkan apabila pendapatan asli daerah tidak cukup tinggi, maka Pemerintah Daerah tersebut dapat dianggap sebagai salah satu daerah tertinggal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

b. Komponen Penyusun Pendapatan Asli daerah

Pendapatan asli daerah memiliki sejumlah sumber perolehan yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah. menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pendapatan Asli Daerah memiliki komponen penyusunan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Setelah mampu memahami makna pendapatan asli daerah secara holistik dan komprehensif berdasarkan pendapat dari para ahli, maka sebagaimana variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan alokasi khusus, variabel pendapatan asli daerah juga membutuhkan suatu indikator yang dapat difungsikan sebagai parameter pengukuran dalam pengolahan data statistik. Sehingga presisi dari perhitungan pendapatan asli daerah dapat menjadi lebih terpercaya. Secara sederhana, dengan logika berpikir matematis, maka pendapatan asli daerah dapat diformulasikan melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak} + \text{Retribusi} + \text{Laba BUMD}$$

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. “Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih”. Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. “Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik”. Penelitian ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2017-2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi Jambi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Jambi Jalan A. Yani No 09 Telanai Pura Jambi Kode Pos 36128. Selain itu, untuk melengkapi data penelitian, Peneliti juga akan melakukan studi literasi melalui akses *website* resmi Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi di laman jambi.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini akan dimulai dari pengajuan judul di minggu akhir bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu konsep data yang terdiri dari *time series* dan *cross section*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumberkan data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Artinya, diperoleh dari luar obyek penelitian yang kaitanya dengan masalah yang hendak diangkat. Data sekunder yang digunakan berupa data dana alokasi umum, dana alokasi

khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Di 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi periode 2017-2022.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Ghozali (2016), populasi adalah jumlah dari semua obyek atau satuan individu yang diamati dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka, populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto, menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Dengan demikian berarti sampel dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dengan 6 tahun periode penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

E. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Library Research*, yaitu mencari dan mengumpulkan data literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, datanya diperoleh dengan cara :
 1. Menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang ada di Provinsi Jambi Dalam Angka melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
 2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian, Penelitian dokumenter digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah kegiatan penelitian mempelajari hal-hal tertulis seperti buku, dokumen, prosedur, dan lain-lain. Penelitian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, mencatat dan menelaah data sekunder yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini berupa data dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi periode 2017 hingga 2022, sumber data melalui website resmi laman jambi.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis secara parsial variabel dana alokasi umum (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil perhitungan *SPSS* versi 26.0 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,745 dan t_{tabel} sebesar 1,99834, menunjukkan bahwa karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,745 > 1,99834$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,105, artinya bahwa dana alokasi umum (X_1) memberikan kontribusi sebesar 10,5% terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misalnya: standar akuntansi pemerintah, kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jubaedah, dimana pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 7,202 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,04227. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,649 yang berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 64,90% terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis secara parsial variabel dana alokasi khusus (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil perhitungan *SPSS* versi 26.0 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,740 dan t_{tabel} sebesar 1,99834, menunjukkan bahwa karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,740 > 1,99834$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan uji signifikansi diperoleh fakta bahwa terdapat pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,179, artinya bahwa pertumbuhan ekondana alokasi khusus (X_2) memberikan kontribusi sebesar 17,9% terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sedangkan sisanya 82,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misalnya: standar akuntansi pemerintah, kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh adanya *gap* yang terlalu jauh antara data dari masing-masing variabel. Secara teori menurut Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dana alokasi khusus ditujukan bagi keadaan yang mendesak seperti bencana alam, jadi dana alokasi khusus tidak memiliki relevansi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi lebih berorientasi pada perputaran ekonomi diantara masyarakat pada suatu wilayah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Jefri dan Nani Rohaeni (2014), dimana dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,182 dengan taraf signifikansi sebesar 0,943 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 3,182. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,002 yang berarti

variabel dana alokasi khusus berpengaruh sebesar 0,20% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim (2014: 16) dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Saputra mengatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan menurut Murniati mengatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil perhitungan *SPSS* versi 26.0 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,027 dan t_{tabel} sebesar 1,99834, menunjukkan bahwa karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,027 > 1,99834$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan uji signifikansi diperoleh fakta bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,202, artinya bahwa pendapatan asli daerah (X_3) memberikan kontribusi sebesar 20,2% terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sedangkan sisanya 79,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misalnya: standar akuntansi pemerintah, kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2018), dimana pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 8,182 dengan taraf signifikansi sebesar 0,003 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 3,182. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,472 yang berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 0,472% terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis secara simultan variabel dana alokasi umum (X_1), dana alokasi khusus (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil perhitungan *SPSS* versi 26.00 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,010 dan F_{tabel} sebesar 2,75, menunjukkan bahwa karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,010 > 2,75$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,279, artinya bahwa dana alokasi umum (X_1), dana alokasi khusus (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) memberikan kontribusi sebesar 27,9% terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sedangkan sisanya 72,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misalnya: standar akuntansi pemerintah, kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vina Fauzia (2018), dimana dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai F-hitung sebesar 7,001 dengan taraf signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai F-tabel sebesar 3,28. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,299 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh sebesar 29,90% terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan, maka sebagai langkah terakhir dari peneliti skripsi yang berjudul pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Jambi periode 2017-2022. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,745 > 1,99834$) dan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 ($0,008 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Dana alokasi khusus (X_2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,740 > 1,99834$) dan nilai signifikansinya berada di atas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Pendapatan Asli Daerah (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,027 > 1,99834$) dan nilai signifikansinya berada di atas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
4. Dana alokasi umum (X_1), dana alokasi khusus (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,010 > 2,75$) dan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka, berikut ini ada beberapa hal yang disarankan, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sehingga apabila Pemerintah Daerah tersebut ingin lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah yang ada di Pemerintahan tersebut perlu diperhatikan.
2. Selain variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah hendaknya Pemerintah Daerah juga memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat kemiskinan, ukuran pemerintah daerah (APBD), indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten/ kota khususnya selain di Provinsi Jambi
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

- [1] Adrian, Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [2] Badan Pusat Statistik. 2009. *Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- [3] Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [4] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Dana Alokasi Khusus*. Buku Elektronik. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [5] Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- [6] Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- [7] Janie, D.B.A., 2012, *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS Cetakan Pertama, Semarang University Press*
- [8] Jinghan, M.L. 2000. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi Pertama. Jakarta : CV. Rajawali.
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Dana Alokasi Umum*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- [10] Sadono, Sukirno. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [11] Wiranta, Sukarna. 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- [12] Tambunan, Tulus. 2006. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah . www.kardin-indonesia.or.id. Diakses : 28 Januari 2016.
- [13] Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekionomi JIE*, 1(2), 143– 152.

Sumber Jurnal

- [1] Ernita, D., Putri, O. H., & Sari, I. P. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jambi*. *Jurnal Akrab Juara*, Vol.5, No.1.
- [2] Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan

DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(2), 143– 152.

- [3] Manek, M., & Badrudin, R. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Telaah Bisnis*, Vol. 17, No.2.
- [4] Metta Maheni, Maryono. (2021). *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2017-2019)*. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 3, No. 2.
- [5] Nisa, Aulia Afafun. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1 Jilid 2. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- [6] Putri, Novi Kumala. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Barat Tahun 2012)*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- [7] Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 4 No. 2. Bangkalan : Universitas Trunojoyo.
- [8] Siswiyanti, Pungky. 2015. *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Akuntansi Akrua*. Vol. 7 No. 1, ISSN : 2502-6380. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- [9] Syukron, Nurkholis. 2016. *Analisis Dana Alokasi Khusus Dalam Serapan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmiah*. Kota Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [10] Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2.

Sumber Internet

- [1] Bappenas. 2020. *DAK Reboisasi Dikhawatirkan Tidak Efektif*. Artikel Daring, diakses melalui : <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/ob/F10524/DAK%20Reboisasi%20Dikhawatirkan%20Tidak%20Efektif.htm>. di-akses pada 3 Mei 2020 (02.24 WIB).
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Dana Alokasi Umum*. Artikel Daring. diakses melalui : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?epk_bpost_type_1=besaran-alokasi-dau-yang-diterima-oleh-masing-masing-daerah-dipengaruhi-oleh-besaran-pagu-dau-nasional-bagaimana-kementerian-keuangan-menentu-kan-alokasi-pagu-dau-nasional. diakses pada 28 Juli 2020 (09.58WIB).

- [3] Tirto.id. 2020. *Dana Tranfer Umum Ke Daerah Tak Efektif, Pembangunan Mandek?*. Artikel Daring. diakses melalui : <https://tirto.id/dana-transfer-umum-ke-daerah-tak-efektif-pembangunan-mandek-dbFG>. diakses pada 2 Mei 2020 (03.32 WIB).
- [4] TribunJambi.com. *inflasi Jambi 8,55 persen tertinggi diindonesia*. Artikel Daring. diakses melalui : <https://jambi-855-persen-tertinggi-di-indonesia>. diakses pada 27 Februari 2023 (09:30 WIB).

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007*. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 128.
- [2] Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 127.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.